

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi, tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik semakin meningkat. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan istilah, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berubah menjadi Perangkat Daerah. Kinerja Perangkat Daerah harus lebih ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi alat bukti transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola uang masyarakat (Irafah & Nurmala Sari, 2020).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui penyampaian pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip aturan tepat waktu dan disusun dengan memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan standar akuntansi dan didukung oleh sistem akuntansi yang dapat diandalkan (Andini, 2016). Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai alat pengendalian, evaluasi kerja, dan sebagai salah satu pertanggungjawaban untuk pengambilan keputusan. Pemerintah diharuskan membuat laporan keuangan yang berkualitas agar para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi yang negatif, salah satunya yaitu menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah dan kualitas keputusan menjadi buruk (Adul Aziiz Ramadhani, 2018). Laporan Keuangan Pemerintah dalam setiap tahunnya akan mendapat penilaian dalam bentuk Opini (pendapat) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan (Pujanira & Taman, 2017). Laporan keuangan yang berkualitas adalah pelaporan yang memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut PP No. 71 tahun 2010 karakteristik laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Bentuk laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian pengguna laporan keuangan tersebut dapat memperoleh informasi yang berkualitas dan bermanfaat. Secara umum tujuan khusus pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan (Bastian, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh (Pujanira & Taman, 2017) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi tiga hal utama. Pertama, adalah kompetensi tenaga kerja yang mengacu pada kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Kedua, adalah penerapan standar akuntansi pemerintah yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, yang bertujuan untuk memastikan penyusunan dan penyajian LKPD yang berkualitas. Ketiga, adalah sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup kerangka kerja yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan entitas pemerintah daerah (Evicahyani & Setiawina 2016) dalam (Philadelphina et al., 2020).

LKPD adalah hasil dari bidang akuntansi yang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Hal ini penting karena LKPD harus memenuhi standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Standar akuntansi ini mencakup

prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian LKPD agar memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah juga merupakan faktor penting dalam menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan secara efektif dan efisien (Philadelphiah et al., 2020).

Dengan demikian, untuk mencapai opini WTP dari BPK, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang kompeten, menerapkan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan, dan memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif dan efisien. Hal ini akan membantu memastikan terwujudnya LKPD yang berkualitas dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan individu yang memiliki kemampuan berupa keahlian, pengetahuan dan perilaku untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien (Fauzi Isnaen, 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan karakteristik dasar, kompetensi tersebut terdiri dari keahlian, pengetahuan, dan perilaku agar mencapai kinerja yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaan. Maka dalam penyusunan laporan keuangan daerah diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Latifah, 2015). Keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusianya tetapi juga oleh kapasitas kompetensi yang dimilikinya. Dalam hal ini kemampuan sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemerintahan tersebut sehingga laporan keuangan dapat dikerjakan dan diselesaikan tepat waktu (Rahman & Permatasari, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Pujanira & Taman, 2017) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Sebuah sistem dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Salah satu sistem yang berguna untuk menyusun laporan keuangan yaitu Sistem Informasi Akuntansi (SIA) (Adul Aziiz Ramadhani, 2018). Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern (Sofia, 2015). Pemanfaatan sistem tersebut yaitu untuk mempermudah dalam mengolah data, memproses, mendapatkan, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara agar menghasilkan informasi yang berkualitas. Semakin baik penggunaan teknologi pemerintah, semakin baik pula kualitas laporan yang akan dihasilkan.

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 mendefinisikan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagai suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Penerapan sistem informasi akuntansi diawali dengan pengelompokan, pengklasifikasi, pencatatan dan pengolahan keuangan pemerintah serta menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang berisi informasi yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh (Pujanira & Taman, 2017) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah dalam mengelola pemerintahan daerah dibantu oleh Badan dan Dinas. Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan untuk membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas untuk membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu Badan dan Dinas harus

meningkatkan kualitas laporan keuangannya untuk terwujudnya tujuan dalam menunjang dan melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo berhasil meraih opini WTP selama 9 tahun berturut-turut sejak tahun 2013. Hal tersebut berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur tahun anggaran 2020. Sedangkan Kepala Sekretariat BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Sigit Pratama Yudha menyampaikan opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya (Akbar, 2022).

Penelitian ini mengambil objek Badan dan Dinas dikarenakan terdapat isu-isu yang terjadi pada Badan dan Dinas di Kabupaten Probolinggo diantaranya Kompetensi dan kualitas SDM terbatas, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang belum optimal, belum adanya prosedur operasional baku (*Standar Operating Procedure*), Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-Perangkat Daerah dan DPA-Perangkat Daerah yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan (Probolinggo, 2021). Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan perangkat daerah Kabupaten Probolinggo ?

2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan perangkat daerah Kabupaten Probolinggo ?
3. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan perangkat daerah Kabupaten Probolinggo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat dibuatlah tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan perangkat daerah Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan perangkat daerah Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan perangkat daerah Kabupaten Probolinggo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, pengetahuan dan manfaat untuk :

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi dan dapat mengetahui seberapa besar Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat untuk menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait keuangan.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.